

## **Pendampingan Penyusunan Struktur BUMDES Pulotondo Mulyo Berbasis Potensi Ekonomi di Desa Pulotondo, Tulungagung**

**Annisa Fatimah<sup>1</sup>, Rika Wijayanti<sup>2</sup>, Widi Dwi Ernawati<sup>3</sup>, Marlina Magdalena<sup>4</sup>, Indrayati<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> Politeknik Negeri Malang, Indonesia: annisa.fatimah@polinema.ac.id

<sup>2</sup> Politeknik Negeri Malang, Indonesia: annisa.fatimah@polinema.ac.id

<sup>3</sup> Politeknik Negeri Malang, Indonesia: hersidianto@gmail.com

<sup>4</sup> Politeknik Negeri Malang, Indonesia: annisa.fatimah@polinema.ac.id

<sup>5</sup> Politeknik Negeri Malang, Indonesia: annisa.fatimah@polinema.ac.id

---

### **ARTICLE INFO**

**Keywords:**

Community service;  
BUMDES Structure Preparation;  
Economic Potential

---

**Article history:**

Received 2024-07-10

Revised 2024-08-11

Accepted 2024-09-08

---

### **ABSTRACT**

The Community Service Team (PKM) of the Malang State Polytechnic (Polinema) carried out activities on July 3-4, 2024 at Pulotondo Village, Ngundut District, Tulungagung Regency. This was done to assist the Village-Owned Enterprise or often referred to as Bumdes Pulotondo Mulyo in Pulotondo Village, Ngundut District - Tulungagung Regency in compiling its organizational structure. The existence of Pulotondo village through Bumdes Pulotondo Mulyo must receive serious attention. Bumdes is expected to be able to manage assets, service providers, and other businesses to improve the welfare of its people according to Permendesa No. 4 of 2015. All capital for Bumdes Pulotondo Mulyo is obtained through direct participation from separated Village assets. This PKM activity is carried out in several stages, namely during pre-activity, activity implementation and post-activity. Based on the results of the pre-activity, the potential superior businesses owned by Bumdes are catering businesses, livestock/fishery feed distributors, and have a household waste business management plan. Therefore, the design of the Bumdes Management structure must be appropriate. To achieve organizational goals, Bumdes management really needs the support of management functions. The organizational structure of Bumdes Pulotondo Mulyo is not yet effective and stable. The initial steps that have been taken are to prepare the organizational structure and educate the job descriptions of all Bumdes managers. This activity received a positive perception from the Bumdes Pulotondo Mulyo Management. According to Bumdes, the PKM activity is very useful and opens up new insights that are ready to be applied to the Bumdes organization. It is hoped that this assistance can continue to be focused on strengthening the community's economy, increasing information, knowledge and skills, which must be carried out in multiple aspects, both from the aspects of society, social, culture, village government policies and marketing potential for Bumdes Pulotondo Mulyo.

---

This is an open access article under the [CC BY-NC license](#).



---

**Corresponding Author:**

Annisa Fatimah

Politeknik Negeri Malang, Indonesia, annisa.fatimah@polinema.ac.id

---

## 1. PENDAHULUAN

Bumdes Pulotondo Mulyo sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang memiliki peran strategis dapat menggunakan Undang - Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana disampaikan oleh Aisyah et al. (2022); Bumdes.id (2018); Chikmawati (2019); serta Iyan et al. (2020) dalam melakukan inovasi pengoptimalan aset desa untuk peningkatan perekonomian desa baik melalui penciptaan peluang usaha, lapangan pekerjaan sehingga dapat mengembangkan ekonomi desa yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan desa (melalui Bumdes). Diharapkan Desa Pulotondo, Kecamatan Nguntut, Kabupaten Tulungagung, dapat menjadi desa yang mandiri jika Bumdes Pulotondo Mulyo dapat dikelola secara optimal sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan rencana pembangunan ekonomi desa.

Kegiatan ini berawal dari ide saat kunjungan dan diskusi mahasiswa Polinema serta pra kegiatan PKM dilaksanakan di desa tersebut pada tanggal 22 – 24 Desember 2023. Diskusi pro aktif antara Kepala Desa Pulotondo, pengelola Bumdes, serta pengusaha (masyarakat) rintisan Kerjasama Bumdes secara langsung memberikan gambaran data yang cukup untuk mengevaluasi kebutuhan, tim PKM merencanakan kegiatan dengan berbicara tentang sarana prasarana, metode penyampaian, target audiens, jadwal, dan sumber daya yang diperlukan. Sebagaimana direncanakan, pendidikan pemasaran online ini diberikan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan pelatihan untuk menambah produk Bumdes.

Saat proses pendampingan, Bumdes Pulotondo Mulyo masih sangat baru, keberadaannya masih mencari bentuk di seluruh siklus organisasi, sehingga membutuhkan pendampingan yang tepat. Untuk itu, setelah pendirian Bumdes Pulotondo Mulyo perlu kiranya menyesuaikan klasifikasi kebutuhan pelaksanaan kinerja organisasi Bumdes apakah termasuk dalam klasifikasi rintisan (*start up*), tumbuh (*growth*), matang (*mature*), maju (*take off*) atau malah sudah dalam klasifikasi besar (*enterprise*). Berdasarkan klasifikasi yang diutarakan oleh Yudha (2020), maka Bumdes Pulotondo Mulyo ini termasuk dalam kategori rintisan (*start up*) berusaha mengelola lebih dari satu unit usaha. Pastinya Bumdes Pulotondo Mulyo mencari model kerja untuk setiap unit usaha yang ada, serta pembagian tanggung jawab untuk masing-masing pengurus. Bumdes Pulotondo Mulyo belum termasuk dalam kategori tumbuh (*growth*), dikarenakan target untung rugi dari modal yang diberikan oleh Pemerintah Desa belum menjadi prioritas utama.

Bumdes Pulotondo Mulyo juga mulai melakukan wujud akuntabilitasnya dengan mencatat seluruh kinerja keuangannya pada form laporan yang diberikan oleh Pemerintah Desa. Harapannya, ketika Bumdes Pulotondo Mulyo berkembang pada tahapan matang (*mature*) dan besar (*enterprise*), mereka mulai menemukan aturan kerja unit usaha di bawah bimbingan direktur yang membawahi kepala unit usaha dan berfokus pada keuntungan yang akan dibagi dengan Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut (Yunita et al., 2019) secara aturan Bumdes harus didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini berarti bahwa perencanaan dan pembentukan Bumdes harus didasarkan pada inisiatif masyarakat desa dan didasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dan harus dilakukan secara profesional. Fokus kegiatan Bumdes dapat diarahkan ke posisi strategis Desa Pulotondo dan potensinya. Bumdes dapat menggerakkan aktivitasnya berdasarkan potensi dan masyarakatnya saat ini dengan syarat tentunya

diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi untuk mengoptimalkan potensi tersebut agar peluang tersebut dapat diubah menjadi peluang bisnis yang menguntungkan (Sadat et al., 2022).

Desa Pulotondo terdiri dari mempunyai potensi yang sangat besar dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.444 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.823 jiwa. Dari hasil pembahasan gambaran umum desa, ditemukan bahwa hampir seluruh wilayah desa Pulotondo merupakan tanah datar, dan letaknya secara geografis strategis. Oleh karena itu, jalur ini merupakan jalur penting yang menghubungkan beberapa wilayah di distrik Ngundu dengan wilayah Sumbergempol. Di desa Pulotondo, pola pengembangan lahan sebagian besar adalah pertanian pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan hortikultura, dan irigasi teknis yang tepat serta pembangunan sumur buatan oleh Lodo Agún berkontribusi pada sistem pertanian yang efektif.

Untuk menjadikan Bumdes sebuah badan usaha yang terorganisir dengan baik, beberapa hal harus disusun diantaranya adalah menyusun *job description*, sistem koordinasi, menyusun pedoman kerja Bumdes, menyusun desain sistem informasi Bumdes, menyusun rencana usaha, menyusun sistem administrasi dan pembukuan, serta mengurus legalitas hukumnya.

Bumdes Desa Pulotondo seharusnya bekerja sama dengan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi umum. Struktur pengelola Bumdes terdiri dari penasehat, pengawas dan pengurus (direktur/ketua, sekretaris serta bendahara). Usaha yang telah dilakukan Bumdes saat ini : jual beli gas LPG 3 kg dan galon isi ulang, BRI Link, Sewa EDC, serta catering. Ada beberapa hambatan dalam pemberdayaan Bumdes, seperti kekurangan sumber daya manusia yang memadai untuk mengelolanya. Meskipun dilihat dari profil Pendidikan terakhir pengelola rentang D3 – S2, namun pengelola tersebut memiliki kesulitan dalam menerapkan *good management*. Dalam perekrutan pengurus Bumdes ini (untuk posisi pelaksana operasional dan badan pengawas Bumdes) sebenarnya telah dilaksanakan melalui musyawarah desa sedangkan staf lainnya hanya dilaksanakan musyawarah antara pengurus dan perangkat desa. Pengangkatan staf tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan personelnya. Namun karena staf ini memiliki pekerjaan tetap di luar Bumdes, hal ini menyebabkan proses perencanaan yang tidak memadai, misalnya belum melibatkan semua aspek atau elemen desa, sehingga perencanaan program kerja Bumdes tidak optimal untuk memenuhi kebutuhan desa. dari hasil wawancara dan analisa laporan keuangan yang dibuat Bumdes menunjukkan bahwa upaya untuk mengeksplorasi potensi desa tidak dapat dikatakan berhasil, sebab dari sejak tahun berdirinya di 2018 usaha Bumdes hanya menghasilkan Laba operasional tidak lebih dari 10 juta per tahun. Kapasitas SDM untuk melaksanakan program Bumdes yang direncanakan dan kurangnya informasi menyebabkan pemahaman yang berbeda tentang bagaimana mengelola Bumdes dengan baik dan kemungkinan pengelolaan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknisnya.

## 2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). *Participatory Action Research* (PAR) merupakan salah satu model penelitian yang mencari sesuatu untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud adalah bagaimana dalam proses pembersayaan dapat mewujudkan tiga tolak ukur, yakni adanya komitmen bersama dengan masyarakat, adanya *local leader* dalam masyarakat dan adanya institusi baru dalam masyarakat yang dibangun berdasarkan kebutuhan (Rahmat & Mirnawati, 2020). Pengabdian Masyarakat dengan pendekatan *Participatory Action Research* beroorientasi pada pemberdayaan masyarakat, karena pemberdayaan harus selalu memenuhi kebutuhan dan penyelesaian masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Pada program pengabdian kepada masyarakat ini, tim penyusun antara lain dari dosen-mahasiswa Politeknik Negeri Malang, program ini merupakan suatu program yang berkesinambungan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Malang yang setiap tahun. Peserta kegiatan PKM ini adalah para Tim Pengelola Bumdes Desa Pulotondo, Kecamatan Ngundu – Kabupaten Tulungagung.



Gambar 1 Kantor Kepala Desa Pulotondo

Kegiatan PKM ini rencananya dilaksanakan di Kantor Desa Pulotondo, Kecamatan Ngunut – Kabupaten Tulungagung pada Bulan Agustus 2024. Tahapan pelaksanaan pelatihan adalah sebagai berikut : Perencanaan pada kegiatan perencanaan diawali dengan kunjungan dan diskusi mengenai kegiatan PKM yang akan dilaksanakan pada desa tersebut. Pelaksanaan wawancara dan diskusi dilaksanakan sebanyak 2 kali, pada tanggal 22 Desember 2023 serta 17 Januari 2024. Hasil kunjungan dan diskusi dengan pengelola Bumdes tersebut adalah desa menyambut baik pelaksanaan PKM dengan menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan PKM dan waktu pelaksanaan ditetapkan menyesuaikan kondisi yang ada.

Pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan materi berupa penyusunan struktur organisasi yang memungkinkan komunikasi, alur komando, dan *workflow* berjalan dengan baik. Analisa kebutuhan yang baik memungkinkan struktur organisasi berfungsi dan SDM di dalamnya bekerja seoptimal mungkin untuk memastikan bahwa struktur organisasi tersebut mampu memenuhi visi, misi, dan program kerja Bumdes agar tujuan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa tetap berada di jalur yang benar.

Program kegiatan PKM dilaksanakan pada 2 - 3 Juli 2024. Tim Pengelola Bumdes Pulotondo Mulyo bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan PKM dan mengundang seluruh pihak yang terkait, seperti Kepala Desa, Bendahara, Sekretaris dan beberapa pengawas Bumdes Pulotondo Mulyo untuk hadir saat kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tersebut. Evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai agar tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini tercapai. Untuk itu, pada kegiatan ini akan diberikan beberapa tips agar Tim Pengelola memperhatikan beberapa hal penting pada pengelolaan manajerial, misalnya saja menyusun *job description*, menetapkan sistem koordinasi serta pedoman kerja, hingga desain sistem informasi Bumdes.

Struktur Organisasi Bumdes Pulotondo Mulyo awal disusun sebagai berikut:

### Struktur Organisasi



Sumber: BUMDes Pulotondo Mulyo

Manajemen sebuah Bumdes Pulotondo Mulyo dapat dilihat dari adanya struktur organisasinya masih sangat sederhana dan belum menyentuh pada sisi tugas dan wewenang setiap personel, master plan, serta sistem prosedur akuntansi akuntansinya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Meskipun, Bumdes Desa Pulotondo telah berdiri pada bidang usaha bisnis jual beli gas LPG 3 kg dan galon isi ulang, BRI Link, Sewa EDC, serta catering. Namun sudah seharusnya Bumdes Desa Pulotondo memiliki usaha bersama masyarakat agar dapat mendorong perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Beberapa kendala telah diidentifikasi diantaranya kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam Tim pengelolaan Bumdes. Agar pihak desa fokus untuk menemukan dan mengenali potensi apa saja yang dimiliki di Desa Pulotondo yang dapat digerakkan agar dapat digunakan untuk menambah PAD juga bermanfaat bagi masyarakatnya diperlukan seorang penanggung jawab seperti Manajer Unit (usaha) Bumdes Pulotondo Mulyo. Posisi ini dibentuk untuk mengelola kegiatan yang dapat menunjang peningkatan ekonomi warga masyarakat desa. Mempertimbangkan pengalaman sebelumnya, pengelolaan kelembagaan ekonomi yang dikelola Bumdes adalah pendekatan baru yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Bumdes Desa Pulotondo. Untuk memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tidak mengalami kegagalan, seperti badan usaha lainnya, Bumdes Desa Pulotondo juga harus membuat rencana kerja pengelolaan usaha. Selanjutnya, semua persiapan yang diperlukan untuk tahap awal pembentukan BUMDes harus dilakukan.

Untuk menjadikan BUMDes sebuah badan usaha yang terorganisir dengan baik, beberapa hal harus disusun menurut (Karim, 2019) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Job Description
2. Menetapkan Sistem Koordinasi
3. Menyusun Pedoman Kerja Bumdes
4. Menyusun Desain Sistem Informasi Bumdes
5. Menyusun Rencana Usaha
6. Menyusun Sistem Administrasi dan Pembukuan
7. Mengurus Legalitas Hukum

Untuk itu, kegiatan PKM ini dikhususkan untuk membantu mengevaluasi struktur Bumdes yang telah ada dan membantu menyempurnakan struktur serta job description, menetapkan sistem koordinasi serta pedoman kerja, hingga desain sistem informasi Bumdes. Seperti yang telah disampaikan oleh (Suparji, 2019) bahwa pembinaan dan pendampingan manajemen bisnis Bumdes diperlukan. Bumdes dapat bekerja sama dengan pihak lain (Tim PKM) dalam hal ini agar memberikan pelatihan tentang peningkatan kemampuan teknis usaha, seperti pelatihan inovasi teknologi dan inovasi pemasaran, serta pelatihan manajemen keuangan dan manajemen usaha, bahkan pasar, teknologi, dan informasi tentang usaha masyarakat.

Dalam kegiatan PKM ini, secara umum dijelaskan bahwa kebijakan pengembangan Bumdes perlu dilakukan secara bertahap. Kebijakan tersebut antara lain guna menjaga keberlanjutan aktivitas BUMDes berupa penataan organisasi dan kelembagaan, penataan sumber daya manusia, peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan, pengembangan sistem, memperkuat struktur organisasi termasuk membagi tugas, hak dan kewajiban pengurus Bumdes Pulotondo Mulyo.

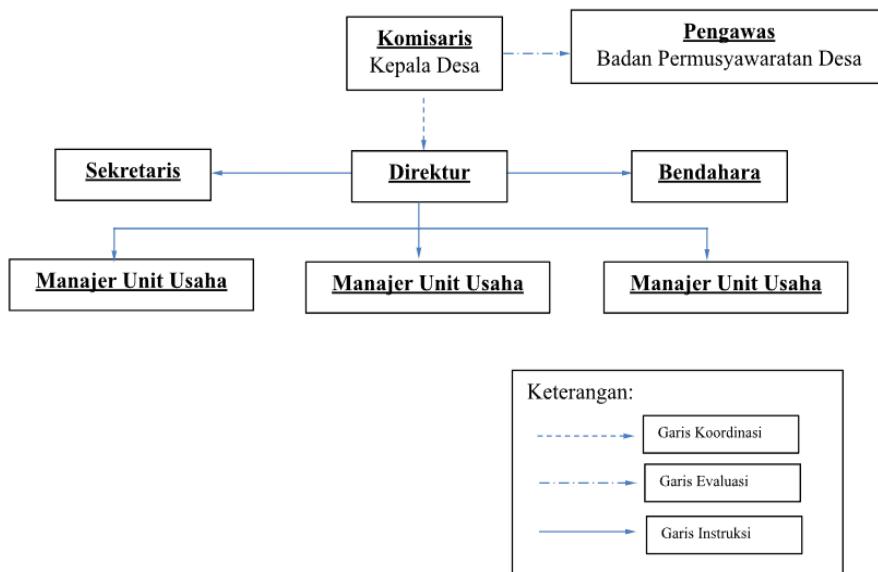
Gambar 1  
FGD Penyusunan Struktur Organisasi Bumdes PuloTondo Mulyo



Sumber Data: Diolah

Tim PKM berusaha menyusun desain struktur Bumdes PuloTondo Mulyo yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan SDM nya. Berikut ini Struktur Organisasi Bumdes PuloTondo Mulyo yang diusulkan.

Gambar 2  
Usulan Desain Struktur Bumdes PuloTondo Mulyo



Sumber data: Diolah

Struktur tersebut memiliki fungsi dan tujuan masing - masing yang dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

#### 1. Komisaris Bumdes

Tugas Pembina atau Komisaris Bumdes adalah melaksanakan dan memberi nasihat kepada para pengelola unit operasional pada masing - masing proyeknya dalam melaksanakan kegiatan urusan desa. Komisaris Bumdes juga bertugas mengawasi dan membimbing personel di tim operasional dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan visi dan misi RPJM desa.

## 2. Pengawas Bumdes

Pengawas Bumdes mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Pengawas juga bertugas melakukan pengawasan manajemen kepada pelaksana operasional dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan Bumdes. Selain itu, Pengawas berhak meminta Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksana Operasional setiap akhir tahun, Laporan Neraca, Laba Rugi dan penjelasan lainnya atas pelaksanaan kegiatan Bumdes.

## 3. Direktur Bumdes

Direktur Bumdes adalah orang yang memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab atas keseluruhan aktivitas Bumdes mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, manajemen dan keuangan. Tugas direktur Bumdes, secara umum memimpin, mengelola dan mengurus Bumdes dan unit-unit usahanya sesuai AD/ART sekaligus merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) nya. Direktur Bumdes harus mampu merumuskan kebijakan operasional Bumdes secara internal maupun eksternal. Bahkan direktur juga berhak mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Bumdes. Direktur memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerja kegiatan dan keadaan keuangan Bumdes secara berkala kepada komisaris dan pengawas Bumdes; dan menyusun dan melaporkan laporan kegiatan usaha dan keuangan BUMDes akhir tahun kepada komisaris/ kepala desa.

## 4. Sekretaris Bumdes

Sekretaris Bumdes mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi Bumdes misalnya melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha Bumdes, melaksanakan administrasi pembukuan keuangan Bumdes, serta mengelola surat menyurat secara umum agar data dan informasi unit usaha dapat dikelola oleh Bumdes.

## 5. Bendahara

Bendahara Bumdes mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha Bumdes. Bendahara juga melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha Bumdes sekaligus melaksanakan strategi pengelolaannya hingga menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha Bumdes.

## 6. Manajer Unit Usaha

Manajer unit usaha Bumdes mempunyai tugas membantu direktur dalam mengelola, mengembangkan dan mengurus usaha-usaha Bumdes yang sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

### **Indikator Keberhasilan Kegiatan PKM**

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan PKM dapat diukur melalui ketercapaian indikator keberhasilan program, kondisi sebelum, dan sesudah terlaksananya program. Program kegiatan dengan tolak ukur keberhasilannya yang dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1  
Indikator Keberhasilan Program Kegiatan PKM

<b>Indikator Keberhasilan Program Kegiatan PKM</b>	<b>Sebelum Kegiatan</b>	<b>Setelah Kegiatan</b>
Pengelola Bumdes dapat mengevaluasi kelemahan dan kelebihan struktur Bumdes yang telah ada	Pengelola Bumdes belum dapat mengevaluasi kelemahan dan kelebihan struktur Bumdes yang telah ada	Pengelola Bumdes dapat mengevaluasi kelemahan dan kelebihan struktur Bumdes yang telah ada
Pengelola Bumdes dapat menyempurnakan struktur organisasi Bumdes	Pengelola Bumdes belum dapat menyempurnakan struktur organisasi Bumdes	Pengelola Bumdes dapat menyempurnakan struktur organisasi Bumdes
Pengelola Bumdes dapat menyusun job description serta menetapkan sistem koordinasi serta pedoman kerja Bumdes.	Pengelola Bumdes belum memiliki Pedoman job description serta menetapkan sistem koordinasi serta pedoman kerja Bumdes.	Pengelola Bumdes telah memiliki job description serta dapat menetapkan sistem koordinasi serta pedoman kerja Bumdes.

Sumber data : Diolah

#### 4. KESIMPULAN

Untuk menjadikan Bumdes sebuah badan usaha yang terorganisir dengan baik, beberapa hal harus disusun diantaranya adalah menyusun *job description*, sistem koordinasi, menyusun pedoman kerja Bumdes, menyusun desain sistem informasi Bumdes, menyusun rencana usaha, menyusun sistem administrasi dan pembukuan, serta mengurus legalitas hukumnya. Kegiatan ini mendapatkan persepsi positif dari pihak Pengelola Bumdes Pulo Tondo Mulyo. Menurut pihak Bumdes, kegiatan PKM sangat bermanfaat dan membuka wawasan baru yang siap diaplikasikan pada organisasi Bumdes. Kegiatan ini terbukti dapat membantu pengelola Bumdes mengevaluasi kelemahan dan kelebihan struktur Bumdes yang telah ada sehingga pengelola Bumdes dapat menyempurnakan struktur organisasi Bumdes Pulo Tondo Mulyo mulai dari menyusun job description serta menetapkan sistem koordinasi serta pedoman kerja Bumdes. Pendampingan ini dapat terus dilanjutkan agar terfokus pada penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya, sosial, budaya, kebijakan pemerintah desa serta potensi pemasaran untuk Bumdes Pulo Tondo Mulyo.

#### REFERENSI

- Aisyah, Rawa, R. D., & Pratiwi, W. (2022). Pelatihan Strategi Pemasaran Hasil Bumdes Punggur Besar Melalui Media Sosial. *JPKMM : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Manajemen*, 02(01), 1–6.
- Bumdes.id. (2018). *Peran BUM Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa*. Bumdes.Id. <https://blog.bumdes.id/2018/02/peran-bum-desa-dalam-meningkatkan-kesejahteraan-desa/>
- Chikmawati, Z. (2019). Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 101. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.345>
- Darwita, I. K., & Redana, D. N. (2018). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 9(1), 51–60.
- Hapsari, T. P. (2019). Peningkatan Pendapatan Ibu Rumah Tangga. *Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat, November*, 385–390.
- Hartika, D., Ririen, D., & Dewi, K. (2020). Analysis Factors Of Constraining Housewives To Became Entrepreneurs (Study in Air Jernih Village, Indragiri Hulu District). *Kewirausahaan Dan Bisnis*,

- 176(2), 176–187. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/KURS/index>
- Ilmi, Z. (2021). Potret Aspek Pasar dan Pemasaran untuk BUMDes ‘Karya Mandiri’ (Desa Sepakat, Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal Pustaka Mitra*, 1(1), 43–48.
- Iyan, Mawung, A. S., & Mantike, B. (2020). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Mulia di Desa Purwareja Kabupaten Lamandau. *Journal of Environment and Management*, 1(2), 103–111. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/jem/article/view/1745/1599>
- Karim, A. (2019). Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). In *Nas Media Pustaka*. <https://www.academia.edu/download/62440051/EBOOK-BUMDes20200322-77446-186t2rg.pdf>
- Pangestu, A. T. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Administrasi Negara*, 126–133.
- Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakatdi Desa Tibubeneng Kuta Utara. *Jurnal Riset Akuntansi JUARA*, 9(2), 39–47.
- Praptono, S., & Budiyanto, H. (2002). Prospek Usaha Kecil Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Rakyat. *Dinamika Sains: Majalah Ilmiah Universitas Pandanaran*, 5(3), 248–253. <https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/dinsain/article/download/161/157>
- Sadat, A. M., Sholikhah, Rivai, A. K., Parlina, R., Febrilia, I., Sari, D. A. P., & Krissanya, N. (2022). Penyusunan Disain Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa berbasis Potensi Ekonomi Masyarakat, Desa Wisata Edukasi Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang-Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari*, 1(6), 481–492. <https://doi.org/10.55927/jpmb.v1i6.1298>
- Septiansyah, B., & Kushartono, T. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Academia Praja*, 5(1), 105–116. <https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.959>
- Suparji. (2019). Pedoman Tata Kelola Bumdes. In *UAI Press*. UAI Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Yudha, V. (2020). *Klasifikasi dan Tahapan Perkembangan BUMDesa*. <https://www.desabisa.com/klasifikasi-dan-tahapan-perkembangan-bumdesa/>
- Yunita, K., Mustika, I. G., Rusmita, S., Prihartini, D., & Mustakim, U. (2019). Konsep Pendirian dan Pengembangan Bumdes. *Prosiding SATIESP 2019*, 171–177.
- .

